



Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Deska Zulkarnain¹ Mitrayanti²

Universitas Karimun, Jalan Canggai Puteri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
deskaalhaqi@gmail.com

Received : Maret 5, 2020; Accepted : April 17, 2020
DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(1).4998

Abstract

In a government organization, the combination of the role of government and the elements of the creation of good governance must complement each other, meaning that all practices of the role of the leader and the leadership system must complement each other. This means that all practices of the leadership role must be supported by transparency, participation, responsiveness, accountability and the rule of law, so that good governance leadership can be realized. Camat as the ruler of the sub-district government seeks to further enhance his role. so that the implementation of public services in accordance with the wishes of the community. The purpose of this study was to determine the role of the Camat in Achieving Good Governance in the Buru District Office. Data collection techniques in this study were observation, questionnaire and interview techniques. Respondents in this study amounted to 28 people consisting of sub-district office employees. Then the data analysis techniques that the authors use in the study are descriptive qualitative, namely analyzing that seeks to provide detailed descriptions based on the reality encountered in the field then the data are grouped and presented in the form of descriptions or tables then conclusions and suggestions are drawn. The result is that the Head of Buru District is considered capable of carrying out his role as a leader in making decisions, in building teams, and in providing motivation for his subordinates. The role of the Buru District Head in realizing good governance is transparency, participation, responsiveness, accountability and rule of law. Based on this research shows that both in participation, transparency, responsiveness, accountability, and rule of law, the Buru District Head has been able to realize the principles of Good Governance even though there are still only a few shortcomings. Human resources in the organization have a very big role to create better governance, especially in the Buru District office.

Key Words : Role of the Camat, Good Governance

Abstrak

Dalam sebuah organisasi pemerintah, kombinasi antara peran pemerintah dengan unsur terciptanya good governance harus saling melengkapi, artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan dengan sistem kepemimpinan yang harus saling melengkapi. Artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan harus didukung oleh transparansi, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum, agar kepemimpinan good governance bisa terwujud. Camat sebagai penguasa pemerintah kecamatan berupaya untuk lebih meningkatkan perannya. sehingga terlaksananya pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Kantor Kecamatan Buru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuisisioner dan wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 28 orang yang terdiri dari pegawai kantor camat. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis yang berupaya memberikan gambaran-gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan kemudian data

dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian atau tabel kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Hasilnya adalah Camat Buru dianggap sudah mampu menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi kerja bawahannya. Peranan Camat Buru dalam mewujudkan good governance yaitu transparansi, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam partisipasi, transparansi, daya tanggap, pertanggung gugatan, dan supremasi hukum, Camat Buru telah mampu mewujudkan prinsip Good Governance meskipun masih terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan Good Governance yang lebih baik lagi khususnya di kantor Kecamatan Buru.

Key Words : Peran Camat, Good Governance

Pendahuluan

Dilingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin. Dari kata pemimpin itu sehingga muncul istilah kepemimpinan. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikut-pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.

Pimpinan atau atasan merupakan orang yang paling tepat untuk mengambil inisiatif dalam usaha menciptakan hubungan yang baik diantara orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi, karena pimpinan merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap jalannya roda pemerintahan. Menciptakan. hubungan

yang baik merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga karena unsur manusiawi merupakan unsur yang paling penting yang menentukan sukses tidaknya roda pemerintahan tersebut.

Konsep good governance sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi public dalam pengambilan kebijakan. Beberapa pakar dan teoritis administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang public.

Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan public tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerinthan (good governance).

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik/good governance tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah diera otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partiisipaasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public dewasa ini. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari

berbagai stakeholders untuk mewujudkannya.

Berbarengan dengan hal tersebut, aktivitas pemerintahan Kecamatan Buru, dalam hal ini peranan Camat sebagai pucuk pimpinan ditingkat kecamatan, juga menghadapi kendala dalam upaya mewujudkan good governance. Kendalanya adalah minimnya kreativitas dari pihak kecamatan untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Buru melalui aset-aset Kecamatan Buru seperti pelabuhan, pertanian dan lain-lain. Namun demikian kendala-kendala tersebut masi perluh dibuktikan melalui penelitian empiris. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Studi pada Kantor Camat Buru Kabupaten Karimun.

Tinjauan Pustaka

Peranan

Pada dasarnya peran adalah keseluruhan dari aktifitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas. Peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menyangkut tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan.

Menurut Thoha (1993: 80) peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Pada tingkat organisasi berlaku bahwa semakin kita dapat memahami konsep peranan, maka semakin kita dapat memahami tepatnya

keselarasan atau integrasi antara tujuan dan misi organisasi.

Peranan merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari seseorang/kelompok berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu. Peranan adalah khas yang dipentaskan yaitu tindakan oleh individu dalam kedudukannya (Koentjaraningrat, 1991: 172). Sedangkan Siagian (1997:3) menyatakan tentang pengertian peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan.

Peranan Pemimpin

Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dimana pemimpin merupakan titik tombak dari suatu kelompok/masyarakat maupun dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembangunan.

Pemimpin selalu menciptakan adanya partisipasi bawahan, oleh karena itu pemimpin harus pandai membimbing, memotivasi, menggerakkan bawahannya sehingga dapat mengetahui dan merasakan bahwa dirinya turut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sebab berhasil tidaknya organisasi tergantung dari bagaimana peranan itu dijalankan dimana pemimpin sebagai pengambil keputusan sekaligus juga pemimpin dan bawahan pelaksana tugas kegiatan.

1. Peranan pimpinan dalam pengambilan keputusan

Pimpinan sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap

hasilnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka dia seharusnya tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah kosekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.

Dalam pelaksanaannya, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti :

- a. Identifikasi masalah
 - b. Medefenisikan masalah
 - c. Memformulasikan dan mengembangkan alternatif
 - d. Implementasi keputusan
 - e. Evaluasi keputusan
2. Peranan pimpinan dalam membangun tim

Tim adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk menyukseskan tujuan bersama kelompok organisasi atau masyarakat. Tujuan dari pembentukan tim disini adalah membangun unit kerja yang solid yang mempunyai identifikasi keanggotaan maupun kerja sama yang kuat. Pedoman umum dalam membentuk atau membangun tim yaitu :

1. Menanamkan pada kepentingan bersama
2. Menggunakan seremoni dan ritual-ritual
3. Menggunakan simbol-simbol untuk mengembangkan identifikasi dengan unit kerja
4. Mendorong dan memudahkan interaksi sosial yang memuaskan
5. Mengadakan pertemuan-pertemuan membangun tim
6. Menggunakan jasa konsultan bila diperlukan

Didalam suatu organisasi, khususnya birokrasi pemerintahan dijalankan oleh para pegawai dengan menunjukkan berbagai macam kinerja khususnya dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Secara fisikologis, kinerja yang ditunjukkan oleh para pegawai salah satunya dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan yang ada.

Seorang pemimpin dalam memotivasi harus menyadari bahwa orang akan mau bekerja keras dengan harapan bahwa ia akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan dari hasil pekerjaannya.

Menurut Vithzal Rivai (2005:455) “motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi indufidu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan indufidu”.

Kemudian menurut Sondang P. Siagian (2004:138) bahwa : motivasi adalah daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan relh untuk mengerahkan kemampuan, dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibanya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Good Governance

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang governance

dan pengertian yang hendak kita perbincangkan dan yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolah pemerintahan, tata pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan good governance sebagai prasyarat utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi Negara Indonesia, istilah good governance telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamindjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government) (Kartini, 2011 : 15).

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Prinsip – prinsip good governance antara lai adalah prinsip responsif (cepat tanggap), keadilan, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. (Basri, 2007 : 46).

Kosekuensi diterapkanya otonomi daerah dan asas desentralisasi seperti yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui oleh UU No. 32 Tahun 2004, lahirkan local government (pemerintah lokal) yang diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya. Urusan mengenai rumah tangganya sendiri sering disebut otonomi sedangkan pemerintahanya disebut lokal government atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan hubungan pemerintah lokal dan pemerintah pusat hanya dalam hubungan pengawasan saja. Lokal

government dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip good governance.

Good governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. United National Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

Dari definisi tersebut governance meliputi 3 domain yaitu negara (pemerintah), dunia usaha (swasta) dan masyarakat yang sering berinteraksi. Arti good dalam good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut.

Metode

Sesuai tempat studi dilakukannya penelitian ini yakni pada Kantor Camat Buru Kabupaten Karimun, maka

responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pegawai Kantor Camat Buru Kabupaten Karimun, yang berjumlah 15 orang. Berhubung kecilnya jumlah populasi dijadikan sebuah sampel penelitian yakni 15 orang. Dalam penelitian ini juga ditetapkan 3 orang informan kunci sebagai sumber data di pilih secara sengaja (purposive) yakni : Sekretaris Camat Buru, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Didalam penelitian ini, untuk menganalisis data dikumpulkan digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun skunder selanjutnya disusun, dianalisis, diimplementasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dari data dan fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketinggian abstraksi yang lebih tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinya, dimana maju mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas seorang pemimpin. Begitu pula di sebuah Kecamatan Buru juga terjadi hal demikian.

Didalam penelitian ini akan dideskripsikan beberapa peran yang dilakukan oleh Camat Buru meliputi : peran camat dalam pengambilan keputusan, peran camat dalam membangun tim dan peran camat dalam memberikan motivasi. Ketiga aspek tersebut diperlukan untuk mensinergikan orientasi pemerintahan yang ideal. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan mengenai peran camat tersebut yaitu sebagai berikut

Peranan Camat dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih diantara alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi sebuah masalah. Fokus pengambilan keputusan terletak pada metode serta kemampuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin dalam hal ini adalah pak camat.

Tentunya, kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka yang bersangkutan seharusnya mundur dari statusnya sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin sekaligus sebagai pencitraan bagi dirinya.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap metode yang digunakan Camat Buru dalam pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 1.
Tanggapan Responden Terhadap Tata Cara Yang Digunakan Camat Dalam Pengambilan Keputusan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	26	92,86
2	Kurang Baik	2	7,14
3	Tidak Baik	-	-
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan secara umum tata cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Camat Buru adalah sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yaitu sebanyak 92,86 % mengatakan bahwa metode pengambilan keputusan yang diambil oleh Camat Buru sudah baik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Camat Buru tanggal 30 Oktober 2019, sebagai berikut : “ saya sebagai bagian dari sistem pemerintahan kecamatan, menganggap bahwa Camat Buru sudah tepat dalam tata cara pengambilan keputusan, karena dalam setiap pengambilan keputusan camat selalu memperhatikan berbagai instrumen, seperti kepentingan bersama”.

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara yang digunakan Camat Buru dalam mengambil keputusan sudah baik. Karena setiap keputusan yang diambil sudah merupakan kepentingan bersama antara seluruh pegawai kantor Kecamatan Buru dengan tidak menyampingkan kepentingan masyarakat.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap kemampuan Camat Buru dalam pengambilan keputusan terhadap para pegawai kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.
Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan
Camat dalam Pengambilan Keputusan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	25	89,29
2	Kurang Baik	3	10,71
3	Tidak Baik	-	-
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kemampuan Camat Buru dalam pengambilan keputusan menurut responden yang menyatakan baik sebanyak 89,29 % dan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 10,71 %.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 30 Oktober 2019 mengenai kemampuan Camat dalam pengambilan keputusan yaitu : “ saya menganggap Camat sudah mampu dan matang dalam mengambil sebuah keputusan karena terbukti setiap kali ada musyawara tidak ada yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan”.

Perlu diketahui bahwa, dari tabel diatas terdapat pula tanggapan yang kurang baik terkait dengan kemampuan Camat Buru dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan alasan yang subyektif dari responden karena justru kenyataannya banyak yang mengaku sudah baik.

Sehingga kesimpulan dari uraian responden dan wawancara diatas menunjukkan bahwa kemampuan Camat Buru dalam pengambilan keputusan sudah baik. Tentunya ini hal yang bijaksana karena pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan yang namanya kemampuan, sikap dan tanggapan bawahan agar bawahan juga menikmati dan menerima setiap keputusan yang

diberikan oleh pemimpin dalam hal ini adalah seorang Camat.

Peranan Camat dalam Membangun Tim Kerja

Peranan Camat dalam membangun tim merupakan proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas sekelompok anggotanya. Tentunya pimpinan yang berpusat pada tim tersebut.

Olehnya itu seorang pemimpin sangat besar perannya dalam membangun tim sehingga tanggung jawab dari hasilnya adalah merupakan tugas pokok seorang pemimpin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika pemimpin tidak dapat membangun tim maka dengan seharusnya seseorang tersebut tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Membangun tim dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin dalam aspek etika kepemimpinan.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengambilan keputusan Camat adalah sebagai berikut :

1. Dalam membangun tim mengadakan konfirmasi terlebih dahulu
2. Dalam membangun tim mengembangkan identifikasi dengan unit kerja

Untuk mengetahui apakah tanggapan responden pada Kantor Camat Buru, khususnya berkaitan dengan peranan camat dalam membangun tim dapat diketahui melalui kapasitas pemimpin itu sendiri, dimana seorang pemimpin dalam hal ini Camat tentunya sudah mempunyai legitimasi atau kekuatan formal sebagai pemimpin, sehingga sebagian besar kebijakan dapat mempengaruhi bawahan-bawahannya.

Begitu pula dengan kemampuan seorang pemimpin dalam hal melakukan

konfirmasi terlebih dahulu kepada bawahannya sebelum mengambil sebuah kebijakan atau dalam hal membangun kekompakan tim. Hal ini perlu diperhatikan sebagai instrumen pendukung optimalnya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kapasitas Camat Buru mengadakan konfirmasi terlebih dahulu kepada bawahan dalam membangun tim terhadap para pegawai kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.
Tanggapan Responden Terhadap Camat dalam Membangun Tim Kerja Melalui Konfirmasi Kepada Bawahan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Selalu	16	57,14
2	Kadang – kadang	10	35,72
3	Tidak Pernah	2	7,14
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Camat Buru dalam membangun tim kerja mengadakan konfirmasi terlebih dahulu kepada bawahan. Tanggapan responden yang menyatakan pimpinan selalu mengadakan konfirmasi kepada bawahan sebanyak 57,14 % responden, yang menyatakan bahwa pimpinan kadang-kadang mengadakan konfirmasi kepada bawahan sebanyak 35,72 % responden dan responden yang menyatakan pimpinan tidak pernah mengadakan konfirmasi kepada bawahan sebanyak 7,14 %.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa meskipun ada sebagian kecil responden 7,14 % menyatakan Camat Buru tidak pernah mengadakan konfirmasi kepada bawahannya, namun pada umumnya Camat Buru dalam

membangun tim dianggap bijaksana dimana pemimpin selalu mengadakan konfirmasi terlebih dahulu agar diketahui oleh seluruh pegawai atau bawahan. Hal ini perlu dilakukan demi kelancaran proses dalam membangun tim sehingga kekompakan antar pegawai tetap aman dan selalu terjaga.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Camat Buru selalu mengadakan konfirmasi terlebih dahulu kepada bawahannya, hal ini terbukti dengan apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Camat Buru dalam wawancara langsung tanggal 30 oktober 2019 yaitu sebagai berikut : “ Camat Buru dalam melaksanakan tugasnya sebelum membangun tim dalam suatu kesempatan biasanya melakukan konfirmasi dan koordinasi kepada pegawai dan meminta persetujuan kepada pegawai agar proses dalam membangun tim dapat selalu berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan pegawai”.

Hal ini sejalan dengan jawaban responden yang sebagian besar pegawai mengatakan bahwa camat selalu mengadakan konfirmasi dan koordinasi terlebih dahulu kepada pegawai sebelum melakukan pembentukan tim dalam suatu proses pekerjaan, misalnya dalam menangani permintaan pendaftaran KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Dari semua komponen yang menjadi perhatian pemimpin dalam pengambilan keputusan di atas, maka tidak kalah pentingnya seorang pemimpin harus mengembangkan semacam identifikasi dengan unit kerja dalam pengambilan keputusan tersebut. Berikut ini adalah tanggapan responden terkait dengan intensitas Camat Buru dalam membangun tim mengembangkan identifikasi dengan unit kerja terhadap para pegawai

kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel.4.
Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Camat Buru dalam Membangun Tim Kerja Melalui Pengembangan Identifikasi Dengan Unit Kerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Selalu	11	39,28
2	Kadang – kadang	13	46,43
3	Tidak Pernah	4	14,29
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Camat Buru dalam membangun tim mengadakan pengembangan identifikasi dengan unit kerja kepada bawahan, tanggapan responden yang menyatakan selalu mengembangkan identifikasi dengan unit kerja sebanyak 39,28%, tanggapan responden yang menyatakan kadang-kadang mengembangkan identifikasi dengan unit kerja sebanyak 46,43% dan tanggapan responden yang menyatakan tidak pernah mengembangkan identifikasi dengan unit kerja sebanyak 14,29%.

Dengan demikian setelah memperhatikan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kadang-kadang Camat Buru membangun tim melalui pengembangan identifikasi dengan unit kerja. Hal ini terbukti dengan jumlah responden yang menjawab kada-kadang Camat Buru membangun tim melalui pengembangn identifikasi dengan unit kerja adalah 46,43%.

Peranan Camat Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinannya dan didukung oleh

kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi.

Penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibanya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah kedepan Good Governance membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakanya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. Adapun peranan camat dalam mewujudkan Good Governance yang dibahas dalam penelitian ini yaitu transparansi, partisipasi, cepat tanggap, pertanggung gugatan dan supermasi hukum.

1. Transparan

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan

responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Olehnya itu untuk menilai peranan camat dalam mewujudkan good governance pada transparansi yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel. 5.
Tanggapan Responden Tentang Peranan Camat dalam Transparansi di Kantor Camat Buru Kabupaten Karimun

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Transparan	19	67,86
2	Kurang transparan	7	25,00
3	Tidak transparan	2	7,14
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa sebanyak 67,86% responden menganggap bahwa peranan Camat Buru telah keterbuka dengan pegawai dalam menjalankan tugasnya dan pengambilan keputusan, sebanyak 25% responden menganggap bahwa peranan Camat Buru kurang terbuka dengan pegawai dalam menjalankan tugasnya dan pengambilan keputusan, dan sebanyak 7,14% responden menganggap bahwa peranan Camat Buru tidak terbuka

dengan pegawai dalam menjalankan tugasnya dan pengambilan keputusan.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Camat Buru dalam wawancara pada tanggal 30 oktober 2019, beliau mengungkapkan sebagai berikut : “ Camat Buru sebagai pimpinan dikantor ini terbuka dalam memberikan informasi kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut”.

Kondisi ini jelas dapat dikatakan bahwa peranan camat terkait dengan transparansi di kantor Kecamatan Buru dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dapat dikatakan terbuka. Hal ini akan mempunyai efek dengan mengurangi kesempatan praktek KKN yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikanya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya.

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan dan memberdayakan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakanya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

Sehubungan dengan hal diatas maka partisipasi Camat Buru dalam setiap urusan pengambilan keputusan diharapkan sesuai dengan harapan yang

ideal yakni mengikut sertakan semua elemen bawahnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Olehnya itu untuk menilai peranan Camat Buru dalam mewujudkan Good Governance pada partisipasi dapat dilihat pada tanggapan responden terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.
Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Camat Buru dalam Setiap Pengambilan Keputusan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Selalu	19	66,67
2	Kadang - kadang	7	20
3	Tidak pernah	2	13,33
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 66,67% responden menganggap bahwa peranan Camat Buru dalam menjalankan tugasnya selalu berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, sebanyak 20% responden menganggap bahwa peranan Camat Buru dalam menjalankan tugasnya kadang-kadang berpartisipasi dalam sebuah kegiatan dan 13,33% responden menganggap bahwa peranan Camat Buru dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berpartisipasi dalam sebuah kegiatan.

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya good governance, dan hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala seksi Pemerintahan pada tanggal 30 juli 2019 sebagai berikut : " Sebagai seorang pemimpin camat Buru selalu berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang

diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakat".

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Buru selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan dikantor Camat Buru .

3. Daya Tanggap

Aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihasapi oleh masyarakat.

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan jangan pernah mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi.

Untuk menilai peranan Camat dalam mewujudkan good governance dalam hal cepat tanggap pemerintah Kecamatan Buru yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7.
Tanggapan Responden Tentang Peranan Camat Buru dalam Memberikan Tanggapan Terhadap Masalah yang Terjadi di Wilayah Kerja Kecamatan Buru

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Cepat tanggap	28	100
2	Kurang tanggap	-	
3	Tidak tanggap	-	
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 100% responden menganggap bahwa peranan Camat Buru dalam menjalankan tugasnya cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang terjadi dilingkungan kerjanya.

Tanggapan responden diatas dipertegas kembali dengan apa yang diutarakan oleh Sekretaris Camat Buru tanggal 30 Oktober 2019 yaitu : “ Setiap kegiatan yang ada diKecamatan Buru ini Camat selalu reaktif apalagi misalnya ada permasalahan-permasalahan kerja dilingkungan kerjanya, beliau akan cepat turun tangan”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa Camat Buru selalu cepat tanggap dalam setiap permasalahan diwilayah kerjanya.

4. Pertanggung Gugatan

Tata pemerintahan yang bertanggung gugat/bertanggung jawab (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk menilai peranan Camat dalam mewujudkan Good Governance dalam hal pertanggung jawaban pemerintah Kecamatan Buru yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel. 8.

Tanggapan Responden Mengenai Peranan Camat dalam Pertanggung gugatan/ Pertanggung jawaban Terhadap Kegiatan di kantor Camat Buru Kabupaten Karimun

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Bertanggung jawab	28	100
2	Kurang bertanggung jawab	-	
3	Tidak bertanggung jawab	-	
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 100% responden menganggap bahwa Camat Buru bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Buru. Hal ini dipertegas lagi dengan apa yang di ungkapkan oleh Sekretaris Camat Buru dalam wawancara langsung tanggal 30 Juli 2019 yaitu sebagai berikut : “ sebagai seorang pimpinan Camat Buru selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Kecamatan Buru ini dan Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang paling aktif di Kabupaten Karimun”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Buru terkait dengan pertanggung gugatan sangat baik.

5. Supermasi Hukum

Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

Untuk menilai peranan Camat dalam mewujudkan Good Governance dalam hal supermasi hukum pemerintah Kecamatan Buru yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel. 9.

Tanggapan Responden Tentang Peranan Camat dalam Ketaatan Pada Hukum yang Berlaku

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Selalu	22	80
2	Kadang – kadang	2	6,67
3	Tidak pernah	4	13,33
Jumlah		28	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Camat Buru dalam hal ketaatan pada hukum yang berlaku bahwa sebanyak 80% responden menganggap bahwa Camat Buru selalu taat pada hukum yang berlaku, sebanyak 6,67% responden menganggap Camat Buru kadang-kadang taat pada hukum yang berlaku dan sebanyak 13,33% responden menganggap bahwa Camat Buru tidak taat pada hukum yang berlaku.

Hal ini diatas senada dengan ungkapan Sekretaris Camat Buru melalui wawancara langsung tanggal 30 Oktober 2019 yaitu sebagai berikut :

“saya menganggap bahwa Camat Buru sudah pada koridor yang tepat dalam ketaatannya terhadap hukum yang berlaku dan Camat Buru merupakan Camat yang patuh kepada Hukum”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Camat Buru dalam menjalankan tugasnya sudah taat pada hukum yang berlaku meskipun ada juga responden yang menganggap bahwa Camat Buru tidak taat pada hukum yang berlaku dan ini merupakan alasan yang bersifat subyektif”.

Berdasarkan semua uraian penjelasan sebelumnya mengenai Peranan Camat Buru serta indikator dari Good Governance yang diterapkan oleh Camat, maka dapat digambarkan hubungan antra peranan camat dengan good governance, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel. 10.
hubungan antra peranan camat dengan
good governance

Peran Camat	Good Governance
Pengambilan keputusan :	Transparansi
1. Tata cara dalam pengambilan keputusan	• Pemimpin yang terbuka
2. Kemampuan dalam pengambilan keputusan.	Partisipasi
Membangun Tim :	• Pemimpin yang berpartisipasi
1. Mengadakan konfirmasi	Daya tanggap
2. Mengembangkan identifikasi dengan unit kerja.	• Pemimpin yang cepat tanggap
Memberikan motivasi	Pertanggung gugatan
1. Pengembangan melalui kursus dan diklat.	• Pemimpin yang bertanggung jawab
	Supermasi hukum
	• Pemimpin yang taat pada hukum yang berlaku

Dalam sebuah organisasi pemerintah, kombinasi antara peran pemerintah dengan unsur terciptanya good governance harus saling melengkapi, artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan dengan sistem kepemimpinan yang good governance harus saling melengkapi. Artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan harus didukung oleh transparansi, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum, agar kepemimpinan good governance bisa terwujud. Hal ini tentunya sudah diterapkan oleh Camat Buru sesuai data-data yang telah dihimpun baik berupa kuisioner ataupun wawancara.

Kesimpulan

Camat Buru telah melaksanakan berbagai perannya sebagai seorang pemimpin yang ditinjau dari segi pengambilan keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi, yang kenyataanya dapat dilihat dari besarnya presentase

data responden yang telah diolah. Hasilnya adalah Camat Buru dianggap sudah mampu menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi kerja bawahannya.

Peranan Camat Buru dalam mewujudkan good governance yaitu transparansi, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam partisipasi, transparansi, daya tanggap, pertanggung gugatan, dan supremasi hukum, Camat Buru telah mampu mewujudkan prinsip Good Governance meskipun masih terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan Good Governance yang lebih baik lagi khususnya di kantor Kecamatan Buru.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Basri, 2007. Kepemimpinan yang Baik dalam Mewujudkan Good Governance. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Hasibuan. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry. 2003. Peran Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: Bina Rupa Aksara
- James. 2003. Manajemen Strategik dan Teori Kepemimpinan Efektif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kamal, 2009. Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: Bina Rupa Aksara. Koentjaraningrat. 1991. Pemimpin dalam Organisasi. Jakarta: Politea.
- Kartono. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini. 2011. Perilaku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mayu, Uspita. 2009. Skripsi (Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kendari Kota Kendari). Kendari: FISIP UHO.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja.
- Mulyadi. 2009. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Mulyadi. 2010. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Phradiansah. 2012. Skripsi (Penerapan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Konawe (studi pada Kantor Camat Konawe Kab. Konawe). Kendari: FISIP UHO.
- Rivai, Veithzal. 2010. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Jilid II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. 2009. Perilaku Organisasi dan Teori Kepemimpinan Jilid II. Jakarta: PT. Salemba.
- Robbins, 2001, Pemimpin dan Kepemimpinan, Terjemahan Mar'at, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roman. 2008. Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Putusan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, Pandji. 2009. Teori dan Aplikasi Good Governance. Jakarta: Rafika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 1997. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Soejito, Irawan. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaukani HR. Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Terry, George. R, 2001, Principles of Management, Richard D. Irwin Homewood, Illionis di download dari :<http://www.geocities.com>.
- Thoha, Miftah. Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Husaini. 1996. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Jakarta: Insan Cendekia.
- Witular, Erna. 2005. Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Gunung Agung.
- Dukumen**
- Akuntabilitas dan Good governance.LAN dan BPKP: Jakarta.
- Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Universitas Indonesia. Depok. 12 Juni 2001.
- <http://www.depdagri.go.id/konten.pp.2007>.
- <http://www.undp>, memahami good governance dalam [bernegara.co. id](http://bernegara.co.id)
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.